

2.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, seperti aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD Tahun 2016. Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis daerah.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2016, maka secara umum permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Magelang pada masing-masing urusan, dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang permasalahan yaitu (1) permasalahan sumberdaya manusia dan kehidupan beragama, (2) permasalahan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, (3) permasalahan pembangunan prasarana dan sarana daerah, (4) permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup, (5) permasalahan tata kelola pemerintahan dan (6) permasalahan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

2.2.1. Permasalahan Sumberdaya Manusia dan Kehidupan Beragama

1. Urusan Pendidikan

- a. Wajib Belajar 9 tahun belum tuntas
- b. Rata-rata lama sekolah masih relatif rendah
- c. Angka putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah cukup tinggi
- d. APK jenjang pendidikan SMP sederajat dan SMA/SMK/MA/ Paket C relatif rendah;
- e. Rendahnya APM di semua jenjang pendidikan;
- f. Kurangnya kualitas dan kuantitas guru;
- g. Belum optimalnya ketersediaan. keterjangkauan. kualitas. kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
- h. Kurangnya sarana prasana pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

- a. Angka Kematian Bayi (AKB) cukup tinggi;
- b. Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA masih rendah
- c. Kurangnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat;
- d. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan;

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a. Kurangnya pemberdayaan perempuan;
- b. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih relatif rendah
- c. Belum optimalnya upaya perlindungan anak.

4. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- a. Tingginya laju pertumbuhan penduduk.
- b. Prosentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I cukup tinggi

5. Urusan Sosial

- a. Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana keagamaan.
- c. Pendekatan penanganan PMKS dilakukan melalui 4 (empat) pilar yakni perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Data yang tersedia untuk penanganan PMKS ini seringkali kurang valid sehingga menimbulkan permasalahan di lapangan

6. Urusan Kebudayaan

- a. Kurangnya SDM profesional yang menangani kebudayaan, khususnya pamong budaya
- b. Kurangnya perhatian, perlindungan dan pelestarian budaya;
- c. Kurangnya perhatian, perlindungan dan pelestarian terhadap benda cagar budaya.

7. Urusan Pemuda dan Olah Raga

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan.
- b. Sulitnya pembebasan tanah dalam memenuhi sarana prasarana Olah raga

8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. Tingginya angka kemiskinan;
- c. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkait pengentasan kemiskinan.

9. Urusan Perpustakaan

- a. Terbatasnya sarana, prasarana perpustakaan daerah;
- b. Rendahnya minat baca masyarakat.

10. Urusan Ketransmigrasian

Rendahnya keinginan untuk bertransmigrasi.

2.2.2. Permasalahan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal Yang Berdaya Saing

1. Urusan Ketenagakerjaan

- a. Angka Partisipasi Angkatan Kerja relatif rendah
- b. Tingginya angka pengangguran terbuka cukup tinggi

2. Urusan Penanaman Modal

- a. Rendahnya daya saing daerah;
- b. Belum optimalnya kewenangan pelayanan perijinan penanaman modal;
- c. Belum optimalnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional/PMDN;
- d. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

3. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Rendahnya pengelolaan manajemen koperasi;
- b. Rendahnya SDM usaha kecil dan menengah;
- c. Kurangnya akses permodalan;
- d. Terbatasnya akses dan informasi pasar;
- e. Belum adanya pusat perdagangan bersama/UMKM center.

4. Urusan Ketahanan Pangan
 - a. Belum optimalnya upaya-upaya penganeekaragaman bahan pangan;
 - b. Belum optimalnya upaya-upaya pengamanan pangan.
 5. Urusan Pertanian
 - a. Semakin meningkatnya kebutuhan pemenuhan pangan masyarakat;
 - b. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke non pertanian;
 - c. Rendahnya daya saing produk-produk pertanian;
 - d. Rendahnya akses pasar komoditas pertanian bagi petani dan kelompok tani;
 - e. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani;
 - f. Belum optimalnya pengembangan potensi peternakan.
 6. Urusan Pariwisata
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata;
 - b. Kurangnya SDM pelaku pariwisata ;
 - c. Kurangnya manajemen pengelolaan pariwisata.
 7. Urusan Perikanan

Belum optimalnya pengembangan potensi perbenihan ikan darat.
 8. Urusan Perdagangan

Terbatasnya sarana prasarana perdagangan yang memadai.
 9. Urusan Perindustrian;
 - a. Kurangnya daya saing produk industri kecil dan menengah
 - b. Terbatasnya SDM;
 - c. Kurangnya akses permodalan industri;
 - d. Belum teridentifikasikannya keunggulan spasial untuk meningkatkan daya saing daerah.
- 2.2.3. Permasalahan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah
1. Urusan Pekerjaan Umum
 - a. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan;
 - b. Adanya kerusakan jalan dan jembatan;
 - c. Rasio jaringan irigasi yang masih relatif kecil dan adanya kerusakan bangunan irigasi akibat dari letusan Gunung Merapi;
 - d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
 2. Urusan Perumahan
 - a. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna air bersih yang layak dan berkelanjutan;
 - b. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
 - c. Masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di semua kecamatan;
 - d. Tingginya angka rumah tidak layak huni.
 3. Urusan Perhubungan

Kurangnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan.

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan.
- 2.2.4. Permasalahan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup
1. Urusan Penataan Ruang
 - a. Penambangan tidak berijin;
 - b. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak berijin;
 - c. Banyaknya bangunan di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Merapi.
 2. Urusan Lingkungan Hidup
 - a. Masih rendahnya cakupan wilayah pelayanan persampahan;
 - b. Rasio TPS yang masih rendah;
 - c. Kerusakan lingkungan akibat bencana alam;
 - d. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran lingkungan.
 3. Urusan Kehutanan
Kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan. pemulihan. pemeliharaan dan pemberdayaan hutan.
- 2.2.5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan
1. Urusan Perencanaan Pembangunan
Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis. partisipatif. aspiratif. transparan dan akuntabel.
 2. Urusan Pertanahan
Banyaknya kepemilikan tanah yang belum bersertifikat.
 3. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.
 4. Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian
 - a. Kurang efektif dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
 - b. Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan aset daerah.
 5. Urusan Statistik
Kurangnya sinkronisasi data statistik pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki SKPD dan instansi pemerintah.
 6. Urusan Kearsipan
Rendahnya SDM pengelolaan kearsipan.
 7. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Terbatasnya akses informasi yang didapat masyarakat;
 - b. Kurangnya sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika.
- 2.2.6. Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat
1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;

- b. Belum optimalnya pengendalian terhadap kondisi rawan bencana;
- c. Kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- d. Terbatasnya anggaran, personil dan perlengkapan penegakan hukum;
- e. Meningkatnya potensi kerawanan keamanan, ketertiban terkait dengan perubahan sosial, pengangguran dan berkembangnya paham ekstrim (terorisme).

2.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Magelang, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan Kabupaten Magelang 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2014-2019), yaitu:

2.3.1. Isu Strategis Sumberdaya Manusia dan Kehidupan Beragama

1. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberian pendidikan setara dan layak serta peningkatan kompetensi para pendidik;
2. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan serta pemenuhan prasarana pelayanan kesehatan;
3. Perlunya pemberdayaan rakyat miskin untuk meningkatkan kemandirian masyarakat;
4. Perlunya penguatan modal sosial dan budaya lokal;
5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana keagamaan;
6. Perlunya pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

2.3.2. Isu Strategis Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing

1. Perlunya peningkatan pendapatan masyarakat berbasis Usaha Menengah Kecil Mikro;
2. Perlunya peningkatan kemandirian perekonomian daerah yang mampu berdaya saing;
3. Perlunya peningkatan pengembangan pertanian (termasuk peternakan dan perikanan), pariwisata dan industri kecil/menengah sebagai sektor unggulan daerah;
4. Perlunya revitalisasi pasar tradisional, membangun pusat perdagangan bersama bagi hasil pertanian, peternakan dan produk UMKM, dan membangun jejaring kemitraan dengan pihak lain;
5. Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh.

2.3.3. Isu Strategis Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah

1. Perlunya pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan dan irigasi guna menunjang peningkatan ekonomi masyarakat;
2. Perlunya peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan bantuan stimulan guna peningkatan angka rumah layak huni;
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan guna peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
- 4.** Perlunya upaya pengembangan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro, *solar cell* dan panas bumi guna memenuhi layanan pasokan listrik.

2.3.4. Isu Strategis Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup

1. Perlunya pelestarian lingkungan hidup dengan adanya perencanaan pembangunan berkelanjutan;
2. Perlunya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam;
3. Perlunya ‘pencegahan’ dan pengendalian pencemaran lingkungan.

2.3.5. Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan

1. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Perlunya percepatan reformasi birokrasi dalam upaya menuju *Good Governance*;
3. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan. kecamatan sampai kabupaten.

2.3.6. Isu Strategis Keamanan dan Ketentraman Masyarakat

1. Perlunya optimalisasi penegakan hukum oleh aparaturnya yang dibantu masyarakat;
2. Perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.

2.4. PERMASALAHAN PENCAPAIAN PRIORITAS DAERAH

Memperhatikan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018 dan prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018, maka prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2018 dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pendidikan
2. Prioritas Kesehatan
3. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
4. Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah
5. Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik
6. Prioritas Lingkungan Hidup
7. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
8. Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana.

Permasalahan, solusi dan program / kegiatan untuk pencapaian target delapan prioritas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.252.
Permasalahan Terkait Capaian Kinerja Aspek Prioritas Daerah

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	PRIORITAS PENDIDIKAN	<p>a. Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah di Kabupaten Magelang berdasarkan pendataan tahun 2017 sebanyak 7.620 orang , kondisi ini mempengaruhi tidak tercapainya target APK, APM & rata-rata lama sekolah;</p> <p>b. Letak geografis Kabupaten Magelang diantara Kota Magelang dan DIY, sehingga banyak masyarakat yang memilih sekolah di dua wilayah tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target APK di Kabupaten Magelang (data tahun 2017 sebanya 5.345 siswa);</p> <p>c. Angka kemiskinan di Kabupaten Magelang yang cukup tinggi mempengaruhi APK, APM & rata-rata lama sekolah (angka kemiskinan Kab Magelang tahun 2017 adalah sebesar 12,42%);</p> <p>d. Di beberapa wilayah faktor geografis, kultural dan sosial budaya mempengaruhi partisipasi</p>	<p>a. Menurunkan angka putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah.</p> <p>b. Meningkatkan mutu layanan pendidikan sehingga siswa tidak memilih sekolah di wilayah lain.</p> <p>c. Memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi.</p> <p>d. Mendekatkan tempat belajar mengajar dengan tempat tinggal siswa.</p> <p>e. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan rehab ruang kelas terutama pemanfaatan dana DAK.</p> <p>f. Menintegrasikan kegiatan bidang pendidikan dengan Kegiatan SKPD terkait.</p>	<p>a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>b. Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun;</p> <p>c. Penyelenggraaan Pendidikan Non formal;</p> <p>d. Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan;</p> <p>e. Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan;</p> <p>f. Integrasi Kegiatan Bidang Pendidikan Dengan Kegiatan SKPD terkait;</p> <p>g. Fasilitasi dan asistensi perencanaan bidang pendidikan Oleh Bappeda dan Litbangda;</p> <p>h. Penyediaan Bahan Pustaka oleh Dispuspa;</p> <p>i. Meningkatkan Tramtibum di lingkungan sekolah dan Mencegah timbulnya PMKS usia sekolah di jalanan (PGOT) Oleh Satpol PP & PK</p>

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
		sekolah; e. Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 DAK pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kendala regulasi dari pemerintah pusat menyebabkan tidak tercapainya ruang kelas sesuai SNP. f. Penanganan permasalahan pendidikan cenderung bersifat sektoral di Disdikbud kurang terintegrasi pada SKPD diluar Urusan Pendidikan.		
2.	PRIORITAS KESEHATAN	a. Terjadinya kasus kematian ibu melahirkan / bayi disebabkan karena keluarga pasien tersebut membawa ke RS/Puskesmas pasien tersebut sudah dalam kondisi kritis sehingga tidak tertolong b. Masih kurangnya kesadaran kesehatan ibu hamil dan terhadap janin dalam kandungannya. c. Kurangnya kesadaran dan keterbukaan masyarakat /penderita TBC untuk melaporkan kepada petugas	a. Peningkatan sosialisasi dan promosi kesehatan terhadap Ibu hamil dan keluarga tentang persalinan b. Penanggulangan anemia pada ibu hamil dengan pemberian makanan tambahan c. Melaksanakan FGD dan rakor bagi bidan dan lintas sektor d. Peningkatan pemantauan kesehatan ibu hamil e. Memaksimalkan kelas Ibu	a. Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk dan Ibu Hamil KEK b. Penelusuran Kematian Ibu melahirkan, pelaksanaan FGD dan pembahasan risti bumil c. Rapat koordinasi KIA tingkat Kecamatan dan kabupaten d. Pertemuan Surveilans e. Pemanfaatan PWS KIA dan Kohort Ibu Hamil f. Pertemuan Pembahasan Kematian Ibu (AMP) Tk Kabupaten

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
		<p>kesehatan;</p> <p>d. Poses pengobatan yang terputus/tidak tuntas karena masyarakat merasa sudah sembuh, sehingga tidak mau berobat lagi, namun sebenarnya penyakitnya belum tuntas dan masih perlu pengobatan.</p>	<p>Hamil.</p> <p>f. Membangun jejaring layanan TB melalui Public Private Mix (PPM) yang melibatkan seluruh layanan kesehatan pemerintah (RS, puskesmas, klinik, dokter praktik mandiri dalam rangka MENGHIMPUN DATA pasien yang diagnosis TB</p> <p>g. Menemukan kasus secara aktif di masyarakat melalui kegiatan KETUK PINTU oleh kader TB</p> <p>h. Melakukan sosialisasi dan promosi kesehatan tentang TBC</p> <p>i. Melakukan kkrining TB di tempat-tempat khusus meliputi Sekolah dan pondok pesantren</p> <p>j. Melakukan survey kontak serumah pasien TB positif oleh petugas TB; Meningkatkan pejangkauan suspek TB oleh puskesmas yang tidak menemukan TB.</p>	<p>g. Optimalisasi Program perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Tk. Kec</p> <p>h. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya</p> <p>i. Penanggulangan Anemia;</p> <p>j. Pemberantasan Penyakit TB Paru dan Kusta.</p>

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
3.	PRIORITAS PENANGGULA- NGAN KEMISKINAN	<p>Selama rentang 4 tahun terakhir, capaian angka penurunan kemiskinan di Kabupaten Magelang belum sesuai dengan target RPJMD, beberapa hal yang menjadi penyebab lambatnya penurunan angka kemiskinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Data base kemiskinan belum sepenuhnya digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. Efektifitas kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan. Kurangnya keterlibatan perguruan tinggi, pengusaha, masyarakat. 	<p>Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dan diharapkan mampu memberikan penurunan angka kemiskinan secara signifikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatkan akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan seiring terbitnya Perbup 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; Mengupayakan Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta), perguruan tinggi dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan; 	<ol style="list-style-type: none"> Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Tinggi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Kerjasama Pembangunan

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
			c. Memetakan lokasi kemiskinan berdasarkan PBDT 2015 di semua Kecamatan di Kabupaten Magelang; d. Memperbaiki database kemiskinan (Komitmen pelaksanaan program/kegiatan menggunakan data BDT 2015)	m. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan n. Program Pengembangan Budidaya Perikanan o. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan p. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan q. Program Peningkatan Ketahanan Pangan r. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan s. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa t. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
4	Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan: Pertanian, UMKM dan Pariwisata			
4.a	Pertanian	Selama 2014-2016, terdapat tiga indikator yang belum tercapai sesuai	a. Untuk mencapai Skor Pola Pangan Harapan, yang	a. Desa mandiri pangan; b. Pengembangan olahan pangan

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
		<p>target, yaitu Skor Pola Pangan Harapan, Produktivitas Jagung, Produksi Jagung dan Angka Konsumsi Protein Hewani Susu.</p> <p>a. Skor Pola Pangan Harapan menunjukkan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat. Saat ini yang masih rendah adalah konsumsi protein hewannya. Sehingga mempengaruhi nilai PPH secara keseluruhan.</p> <p>b. Produktivitas Jagung belum mencapai target, karena kebanyakan jagung yang dikembangkan oleh petani adalah jagung benih local (bukan benih unggul pabrikan), sehingga memang produktivitasnya masih belum terpenuhi.</p> <p>c. Produksi jagung belum tercapai, karena lahan lebih banyak digunakan untuk menanam padi, karena ada target pajale untuk peningkatan produksi padi (sebagai catatan bahwa padi dan jagung ditanam dilahan yang sama secara bergiliran, sehingga jika produksi padi meningkat, secara bersamaan jagung menurun).</p> <p>a. Angka konsumsi susu, belum tercapai karena produksi susu di sentra sapi perah yang baru di Kecamatan Ngablak mengalami masa peralihan (dari budidaya sapi</p>	<p>sudah dilakukan antara lain melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan, penganekaragaman olahan pangan lokal, Kampanye Konsumsi Makanan B2SA, Gemarikan, Gerimislur, Kampanye Konsumsi Makanan B2SA, dsb.</p> <p>b. Angka Konsumsi Susu, upaya yang sudah dilakukan antara lain program replacement sapi perah melalui dana APBD II, APBD I, maupun APBN dan juga ada dukungan dari BI terhadap pengembangan klaster sapi perah di Kecamatan Ngablak.</p>	<p>lokal;</p> <p>c. Survey pola pangan harapan (PPH);</p> <p>d. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan;</p> <p>e. Peningkatan mutu dan keamanan pangan (B2SA);</p> <p>f. Gemarikan;</p> <p>g. Gerimislur;</p> <p>h. Replacement sapi perah;</p> <p>i. Pengembangan klaster sapi perah (CSR BI).</p> <p>2. Pengembangan UMKM.</p>

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
		perah jantan untuk pembesaran dan penggemukan ke sapi perah betina), sehingga produksi belum optimal		
4.b	UMKM	a. Rendahnya Layanan Pengembangan Usaha b. Rendahnya Kualitas/Kuantitas SDM c. Rendahnya Daya Saing Produk d. Tingginya tingkat pengangguran terbuka	a. Meningkatkan fasilitas pedagang pasar dan PKL b. Peningkatan kemampuan SDM (manajemen / teknis) c. Memfasilitasi promosi, pemasaran dan matchmaking bagi pelaku usaha yang dilaksanakan secara sistematis d. Mendorong Pengembangan ekonomi kreatif menjadi usaha ekonomi yang bersifat masal e. Pengembangan jaringan pelaku usaha lintas daerah dan wilayah melalui fasilitasi asosiasi usaha untuk dukungan kebutuhan bahan baku	
4.c	Pariwisata	a. Terbatasnya infrastruktur pendukung pariwisata b. Kurangnya promosi obyek wisata c. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia pengelola destinasi wisata b. • Belum baiknya sinkronisasi	a. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap dan fokus mengacu pada dokumen rencana pengembangan wisata; b. Peningkatan promosi dan	

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
		pengelolaan obyek wisata oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, maupun pihak ketiga.	atraksi pariwisata dengan sinergitas pemerintah daerah, pusat, masyarakat dan swasta; b. Meningkatkan kualitas SDM pelaku pariwisata	
5	Prioritas Infrastruktur			
5.a	PEKERJAAN UMUM: PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	<p>Panjang jalan kabupaten Magelang dalam kondisi baik dari tahun 2014 s.d 2016 telah mencapai 670,33 km, Jika menggunakan data panjang jalan tahun 2014 (887,83km) capaiannya sebesar 75,50%, dari terget 69,01% maka telah melampaui sebesar 6,49%</p> <p>Namun dengan adanya Penambahan Panjang Jalan dari 887,83 km menjadi 1000,83 km (berdasarkan SK Bupati Magelang Nomor: 180.182 /180/KEP/25/2015), maka prosentase jalan kondisi baik berkurang menjadi 66,98%. Hal ini disebabkan karena panjang jalan kabupaten sebagai faktor pembagi dalam mencari angka proporsi panjang jalan kondisi baik mengalami kenaikan dari 887,83 km menjadi 1000,83 km</p>	Penambahan anggaran tahun 2018 – 2019 untuk rehab/peningkatan jalan dengan panjang jalan yang harus ditingkatkan sepanjang 27,55 km	<p>Pembangunan Jalan Kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017 : Rp. 93.739.787.000,- • 2018 : Rp.104,404,825.000,- • 2019 : Rp. 51.702.744.000,- <p>Rehabilitasi Jalan Kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017 : Rp. 17.226835.900,- • 2018 : Rp. 62.180.625.000,-,- • 2019 : Rp. 55.736.350.000,-
5.b	PERUMAHAN	Perubahan data rumah tidak layak huni pada tahun 2015 mengacu	Penambahan anggaran	Pembangunan RTLH

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
		pada PBDT dengan jumlah menjadi 64.640 unit. Sedangkan baseline 2014 mengacu pada data PPLS tahun 2011. (Data RTLH berdasarkan verifikasi tim	tahun 2018 dan 2019 untuk penguatan kelembagaan pelaksanaan fasilitasi rumah layak huni dan pembangunan RTLH	<ul style="list-style-type: none"> - 2017 (3.701 unit) - 2018 (1.062 unit) Target pembangunan 2018 dan 2019 adalah 45.130 unit. Anggaran : <ul style="list-style-type: none"> • 2017 : Rp. 37.010.000.000,- • 2018 : Rp. 10.062.000.000,- • 2019 : Rp. 440,068,000.000,-
5.c	PERHUBUNGAN	a. Meningkatnya kebutuhan rambu-rambu lalu lintas dan bertambahnya panjang jalan kabupaten karena peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten.	a. Identifikasi ulang kebutuhan dan lokasi rambu-rambu lalu lintas tahun 2018 b. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di lokasi tahun 2018-2019	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas : <ul style="list-style-type: none"> • 2017 : Rp. 465.760.000,- • 2018 : Rp. 101.960.000,- • 2019 : Rp. 466.373.300,-
		b. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum	a. Pembinaan angkutan umum tahun 2018-2019 b. Peningkatan pengelolaan fasilitas dan pelayanan angkutan umum dan terminal angkutan darat tahun 2018-2019	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat: <ul style="list-style-type: none"> • 2017 : Rp. 465.760.000,- • 2018 : Rp. 345.713.000,- 2019 : Rp. 269.045.300,-
6	Prioritas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Semua target indikator telah tercapai 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •
7	Prioritas Reformasi Birokrasi dan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan pencapaian Opini WTP • Belum tercapainya Persentase 	UPAYA PENCAPAIAN : Untuk peningkatan capaian target PAD dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Keuangan Daerah

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
	Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan PAD <ul style="list-style-type: none"> • Belum tercapainya nilai AKIP 	dengan beberapa cara sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur kebijakan dan jalur tata kelola. Jalur kebijakan harus melalui perda sementara jalur tata kelola melalui penyempurnaan administrasi pemungutan pajak; • Di wilayah perkotaan dan resor pariwisata, pajak hotel dan pajak restoran merupakan pajak yang perlu mendapat perhatian khusus; • Memaksimalkan potensi ekonomi dari aset yang dimiliki (Potensi ekonomi bermakna bahwa ada manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Perencanaan Tata Ruang • Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
			sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat dengan memaksimalkan pengelolaan Aset)	
		•	<p>2. Untuk meningkatkan nilai AKIP upaya yang dilaksanakan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan kinerja harus menyentuh substansi perencanaan (outcome seharusnya menjadi awal dari sebuah proses perencanaan) • melakukan inovasi-inovasi untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada hasil • Meningkatkan fungsi monev 	•
8	Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan serta pendidikan politik masyarakat belum sampai ke desa • Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal masih kurang • Pencegahan dini korban penanggulangan bencana masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wawasan kebangsaan dan bela negara serta peningkatan dan pemantapan budaya politik • Meminimalisir gangguan keamanan • Peningkatan pencegahan dini korban penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Gangguan keamanan dalam negeri/ Fasilitasi Penanganan Kasus Masyarakat / Konflik Sosial; • Peningkatan Peran dan Fungsi KOMINDA; • Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan • Peningkatan Kesadaran Bela

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
				Negara; <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) • Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) atau POLMAS Desa; • Sosialisasi Pemantapan Budaya Politik/ Sosialisasi Pilkada

